



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/508/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PADA DELAPAN NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari di Kecamatan Air Pura periode Tahun 2011 - 2017 yakni Nagari Tanah Bakali Inderapura, Nagari Tluk Kualo Inderapura, Nagari Lubuk Betung Inderapura, Nagari Lalang Panjang Inderapura, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Nagari Muara Inderapura, Nagari Palokan Inderapura dan Nagari Pulau Rajo Inderapura telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2017, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari di Kecamatan Air Pura periode Tahun 2017-2023, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2011-2017 diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Air Pura Nomor: 140/353/C.A/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari terpilih periode Tahun 2017-2023 di Kecamatan Air Pura, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari Di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : Pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari Di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KETIGA : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2023.

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari Di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Air Pura
3. Bamus Nagari yang bersangkutan

AMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 508 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA DELAPAN
 NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari Di
 Kecamatan Air Pura Periode Tahun 2017-2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TANAH BAKALI INDERAPURA			
1	RONALDO AHMANDA, S.Pd	Ketua	Pemuda
2	JON RUSDI	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	DONI MAICANDRA,SH	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	HELDA YENI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	AMIRRUDDIN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama
II. TLUK KUALO INDERAPURA			
1	ERWIN	Ketua	Alim Ulama
2	SAPRI JONO	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	YENTI INDRA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ZAITUL	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	JONI ISKANDAR	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
III. LUBUK BETUNG INDERAPURA			
1	HASAN BASRI	Ketua	Alim Ulama
2	IKI CANDRA	Wakil Ketua	Pemuda
3	RAS MAYENTI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	INDRA MARGENDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	MARFAI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

(1)	(2)	(3)	(4)
IV. LALANG PANJANG INDERAPURA			
1	JAFRIL	Ketua	Alim Ulama
2	TARZAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	YUSMIATI	Sekretaris	Bundo Kandung
4	BASRIYUL AKHIR	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	EPI JAYA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak
V. DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA			
1	BUSTAMI	Ketua	Ninik Mamak
2	SAHERMAN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	VERA WATI	Sekretaris	Bundo Kandung
4	NOFRI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	MARJA OKDISON	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
VI. MUARA INDERAPURA			
1	IRVAN IKA KURNIA	Ketua	Cadiak Pandai
2	SAFAR	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	JONI RAMSISDA	Sekretaris	Alim Ulama
4	SRI MARDONA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kandung
5	HENGKI FARDIANTO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
VII. PALOKAN INDERAPURA			
1	AMRAN ALI	Ketua	Cadiak Pandai
2	SETRIANTO, S.Pd.I	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	LENI MARLINA	Sekretaris	Bundo Kandung
4	ADI MARTA DINATA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5		Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

(1)	(2)	(3)	(4)
VIII	PULAU RAJO Inderapura		
1	OGA SUKRI	Ketua	Alim Ulama
2	AMZAN	Wakil Ketua	Pemuda
3	DEVI SUTRI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	BUSTAMAR EFFENDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	YULIARMAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/508 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA DELAPAN
 NAGARI DI KECAMATAN AIR PURA KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Delapan Nagari Di
 Kecamatan Air Pura Periode Tahun 2011-2017

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	TANAH BAKALI INDERAPURA		
1	Drs. HANDRI PAMUS	Ketua	Cadiak Pandai
2	SYAMSUIR	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	MULYADI, RKY SATI LELO	Sekretaris	Ninik Mamak
4	HELDAYANI	Anggota	Bundo Kanduang
5	JUNAIDI	Anggota	Pemuda
II.	TLUK KUALO INDERAPURA		
1	SALMIN RKY RJ MELAYU	Ketua	Ninik Mamak
2	SASTRAFENI	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3	AMRIL	Sekretaris	Alim Ulama
4	EMPRIZON	Anggota	Pemuda
5		Anggota	Cadiak Pandai
III.	LUBUK BETUNG INDERAPURA		
1	JAISTRISNO	Ketua	Cadiak Pandai
2	HASAN BASRI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	INDRAMAWELI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	JUNI EFENDI	Anggota	Pemuda
5	JIDIN	Anggota	Ninik Mamak
IV.	LALANG PANJANG INDERAPURA		
1	JASMAIL, RKY, RJ MALENGGANG	Ketua	Ninik Mamak
2	MARUDIN, S.Pd.I	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	MUHARNI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	TARZAN	Anggota	Pemuda
5	ZAIPAT MAWARDI	Anggota	Cadiak Pandai

(1)	(2)	(3)	(4)
V. DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA			
1	MULYADI	Ketua	Cadiak Pandai
2	AGUSRI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ELI YARNITA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	HAMRIAL	Anggota	Pemuda
5	HARMAINI, SH RKY NAN KODO BSA	Anggota	Ninik Mamak
VI. MUARO INDERAPURA			
1	NURSIWAN, S.Pt	Ketua	Alim Ulama
2	MAHYUDIN	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	APRIZAL	Sekretaris	Pemuda
4	AFRIZAL	Anggota	Cadiak Pandai
5	RITA SUMARNI	Anggota	Bundo Kanduang
VII. PALOKAN INDERAPURA			
1	SURYO SUMPENO RKY RJ JOAN	Ketua	Ninik Mamak
2	ZAINUL, S.Pd	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	LENI MARLINA	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	EMEL	Anggota	Alim Ulama
5	JAL JULISMAN	Anggota	Pemuda
VIII. PULAU RAJO INDERAPURA			
1	MARADIS, M	Ketua	Alim Ulama
2	AMA NASRUL, RKY MALINTANG BUMI	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	BUSRAL	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	TESNEL HERAWATI	Anggota	Bundo Kanduang
5	MARDIWINTA	Anggota	Pemuda


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI